

PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA

LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2024



**DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN SUKAMARA**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara Tahun 2024, ini dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara dalam mencapai misi dan tujuan dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Kami menyadari bahwa LAKIP ini belum menggambarkan kinerja yang ideal. Pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memerlukan waktu yang relatif lama hingga sistem ini berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan di masa yang akan datang. Mudah- mudahan LAKIP ini dapat memberikan masukan berharga dan manfaat untuk peningkatan kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara guna mewujudkan “*good governance*” di lingkungan Kabupaten Sukamara.

Semoga Allah SWT selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sukamara, Januari 2024

Kepala Dinas
Komunikasi Informatika dan Persandian
Kab. Sukamara

DENNY YUDHISTIRA KURNIAWAN S.IP

Pembina TK. I/IV b
NIP. 19750708 2003121009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Gambar	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi	1
1.2 Aspek Strategis Organisasi	2
1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi	4
1.4 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi	6
1.5 Sistematika Penyajian	20
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	22
2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Tujuan dan Sasaran	23
2.3 Strategis dan Kebijakan	23
2.4 Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	31
3.2 Realisasi Anggaran	47
BAB IV PENUTUP	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Saran	54
LAMPIRAN	
Rencana Strategis 2024 - 2026	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara	1
Tabel 1.2 ASN berdasar Jenis Kelamin	12
Tabel 1.3 Tenaga Kontrak berdasar Jenis Kelamin	12
Tabel 1.4 ASN Berdasar Pendidikan	13
Tabel 1.5 Tenaga Kontrak berdasar Jenis Kelamin	13
Tabel 1.6 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kab. Sukamara	13
Tabel 1.7 Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024	20
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD	23
Tabel 2.2 Realisai anggaran tahun 2024	27
Tabel 2,3 Perjanjian Kinerj Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2024	29
Tabel 3.1 Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024	32
Tabel 3.2 Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja Tahun 2024	33
Tabel 3.3 Tabel Kerjasama dengan mas media Tahun 2024	34
Tabel 3.4 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	40
Tabel 3.5 Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tersedianya Buku Statistik Daerah	43
Tabel 3.6 Realisasi Tahun Anggaran 2024	47

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Bagan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	7
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupatem Sukamara	8
Gambar 3.1 Kegiatan Forum FGD SOP SPBE dan PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO	35
Gambar 3.2 Cover Dokumen SOP SPBE	36
Gambar 3.3 Maintenance Jaringan Fiber Optik	37
Gambar 3.4 Pemasangan Wifi Publik	39
Gambar 3.5 Maintenance Jaringan SSB	41
Gambar 3.6 Pendistribusian Buka Buka Statistik	44
Gambar 3.7 Portal Satu Data Sukamara	45
Gambar 3.8 Pelatihan Operasional Satu Data	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang Organisasi

Sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan program informasi dan komunikasi publik;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan program aplikasi informatika;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan statistik sektoral;
- g. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi

- Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
 - k. pengoordinasian penatausahaan arsip di lingkungan Dinas;
 - l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Dinas;
 - m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

1.2 Aspek Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang yang diembannya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara telah menyusun Rencana Strategis Dinas Tahun 2024 – 2026. Rencana strategis tersebut dijabarkan ke dalam rencana kerja per tahunnya.

Sebagaimana tertera pada dokumen-dokumen tersebut, maka aspek strategis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kab. Sukamara

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Kondisi Awal			Target Pembangunan			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Isu Strategis : Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan Indeks SPBE	1,54	1,84	2	2,5	3	3,5	3,5
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya buku statistik daerah	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia	Ter sedia

Sumber: Data Olahan RENSTRA Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2024-2026

1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, sebagaimana yang tercantum pada dokumen Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara Tahun 2024 - 2026, program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1.1 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.1.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.1.2 Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD

1.2 Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.2.1 Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapannya

1.2.2 Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsinya

1.3 Kegiatan Administrasi Perangkat Daerah

1.3.1 Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

1.3.2 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.3.3 Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

1.3.4 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1.3.5 Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1.3.6 Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan

1.3.7 Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu

1.3.8 Sub Kegiatan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 1.4 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.4.1 Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.4.2 Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - 1.4.3 Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.4.4 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 1.5 Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 1.5.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.5.2 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Listrik
 - 1.5.3 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 1.6 Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah
 - 1.6.1 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 1.6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
 - 2.1 Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.1.1 Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - 3.1 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1.1 Sub Kegiatan Penata Laksanaan dan Pengawasan E-Government dalam penyeenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten / koTA
 - 3.1.2 Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintah Daerah
 - 3.1.3 Sub Kegiatan Pengelolaan E-Goverment Chief Information Officer

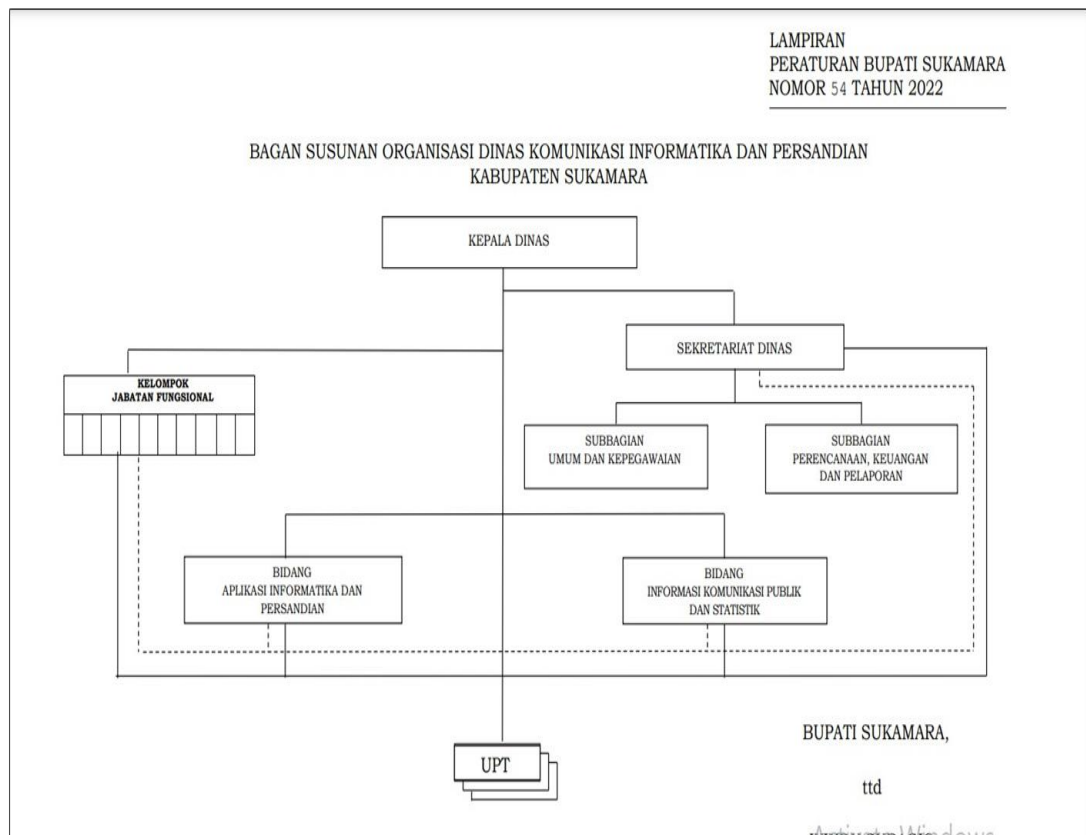
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - 4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Singkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan desiminasi Data Statistik Sektoral
 - 4.1.3 Sub Kegiatan Membangun Meta data Statistik Sektoral
- 5 Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
 - 5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.2 Sub Kegiatan Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - 5.1.3 Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

1.3 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi

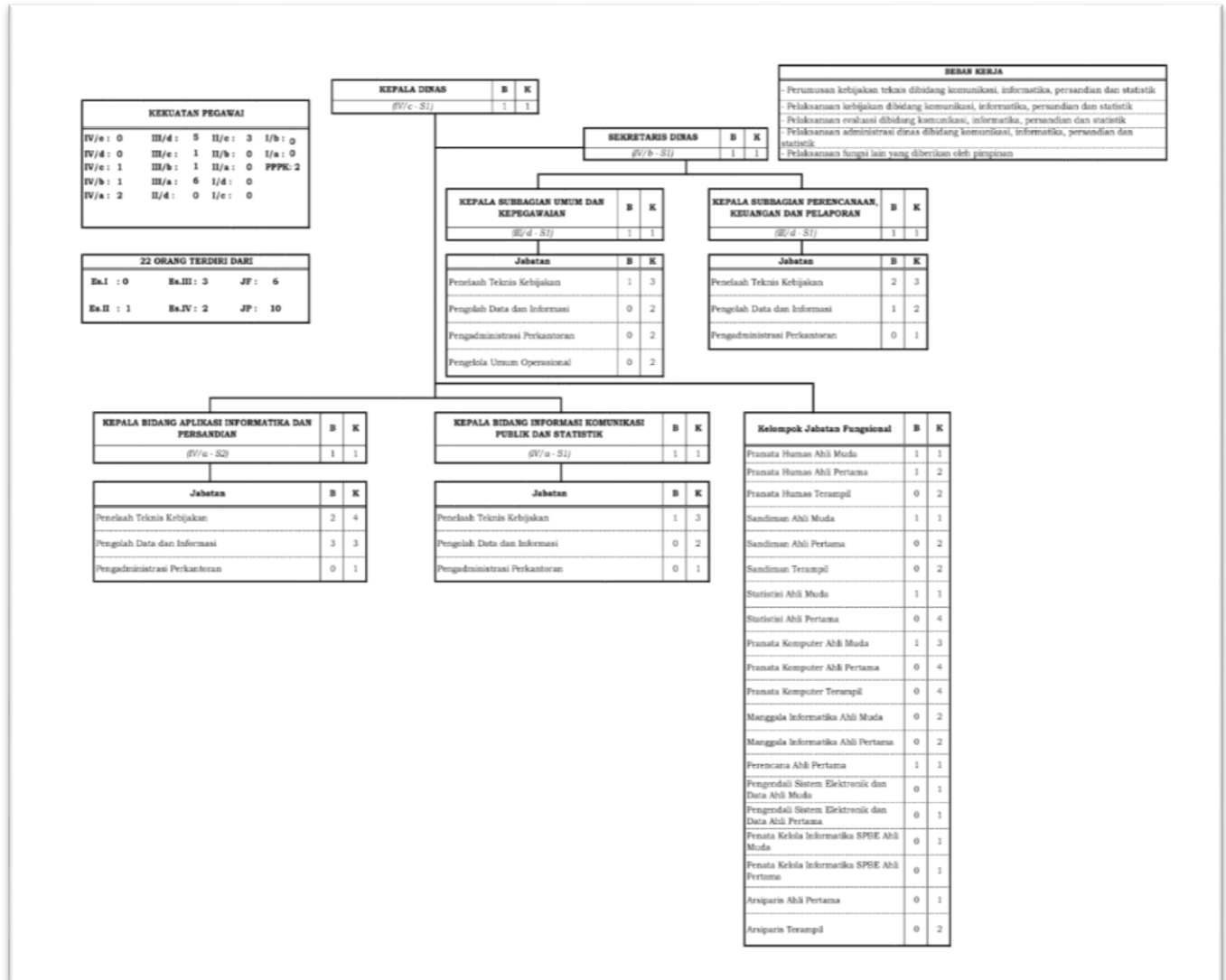
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika DAN Persandian Kabupaem Sukamara berdasarkan Keputusan Bupati Sukamara No. 54 tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.

Bagan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Perbup No 54 tahun 2022

Gambar 1.1
Bagan organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



Gambar 1.2
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara



Sumber Arsip Dinas Kominfosand

Sebagaimana tercantum Keputusan Bupati Sukamara Nomor 54 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara. Dinas mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan program informasi dan komunikasi publik;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan program aplikasi informatika;
- e. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi;
- f. pengoordinasian penyelenggaraan program penyelenggaraan statistik sektoral;
- g. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- h. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas;
- i. pembinaan dan pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- j. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- k. pengoordinasian penatausahaan arsip di lingkungan Dinas;
- l. pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Dinas;
- m. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian kegiatan perencanaan, penyusunan program, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas
- b. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi keuangan Dinas
pengoordinasian penyelenggaraan administrasi barang milik daerah pada Dinas;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi kepegawaian Dinas;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan administrasi umum Dinas;
- e. pengoordinasian pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah;
- f. pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan Daerah;
- g. pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah;
- h. pelaksanaan administrasi pendapatan daerah yang menjadi kewenangan Dinas;
- i. pengoordinasian fasilitasi Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas;
- j. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi terkait kerja sama, hubungan masyarakat, publikasi dan dokumentasi;
- k. pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, dan zona integritas Dinas;
- l. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan pada Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait pelaksanaan Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- c. pengoordinasian pengelolaan informasi dan komunikasi publik Daerah;
- d. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah;
- e. Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah
- f. penatausahaan arsip di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik;
- g. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan di Bidang Informasi, Komunikasi Publik dan Statistik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas Dinas.

Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian :

- a. pengoordinasian perencanaan program dan kegiatan di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
- b. pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis terkait bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Daerah;
- d. pengoordinasian pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Daerah;
- e. pengoordinasian pengelolaan e-government Daerah
- f. penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
- g. Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah
- h. penatausahaan arsip di Bidang Aplikasi Informatika dan Persandian;

- i. pengoordinasian pelaksanaan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan program dan kegiatan pada Bidang Persandian dan Statistik;
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas Dinas

a. Sumber Daya Manusia

Untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, sampai dengan akhir tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara didukung oleh 19 orang ASN dan 2 orang tenaga PPPK serta 7 Tenaga kontrak atau jasa orang perorangan.

Dari 21 orang ASN tersebut terdiri 13 orang ASN dengan jenis kelamin laki-laki dan 8 orang ASN dengan jenis kelamin perempuan. Untuk tenaga kontrak atau jasa orang per orang terdiri dari 5 orang berjenis kelamin laki-laki dan 2 orang berjenis kelamin perempuan.

Tabel 1.2
ASN berdasar Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
ASN DiskominfoSansi (jumlah 21 ASN)	13 Orang	8 Orang
Persentase	62 %	38 %

Tabel 1.3
Tenaga Kontrak berdasar Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	
	LAKI - LAKI	PEREMPUAN
DiskominfoSansi (jumlah 7 Tenaga Kontrak)	5 Orang	2 Orang
Persentase	71 %	29 %

Kemudian berdasarkan pendidikannya, komposisi pegawai/ ASN adalah lulusan S2 sebanyak 1 orang, lulusan S1 sebanyak 15 orang, lulusan diploma sebanyak 5 orang untuk ASN dan lulusan SMA/ sederajat sebanyak 0 orang.

Sedangkan untuk tenaga Non ASN, lulusan S1 sebanyak 1 orang, lulusan D3 sebanyak 0 orang dan lulusan SMA sederajat sebanyak 6 orang.

Tabel 1.4
ASN Berdasar Pendidikan

NO	JENIS KELAMIN		
	S2	S1	DIPLOMA
ASN Diskominfoansi (Jumlah 21 ASN)	1 Orang	15 Orang	5 Orang
Persentase	4 %	72 %	24%

Tabel 1.5
Tenaga Kontrak berdasar Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN		
	S2	S1	DIPLOMA
Diskominfoansi (Jumlah 7 Tenaga Kontrak)	0 Orang	1 Orang	6 Orang
Persentase	0 %	4 %	86%

b. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara merupakan sebagai salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi.

Tabel 1.6
Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi Informatika
Dan Persandian Kab. Sukamara

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Jumlah	Perolehan
1	2	3	4
1	Sepeda Motor	1 unit	2008
2	Papan Nama Instansi	1 unit	2008
3	Sepeda Motor	1 unit	2010
4	Alat Rumah Tangga Lain-lain	1 set	2014
5	Lap Top	1 unit	2015

6	External/ Portable Hardisk	1 unit	2015
7	P.C Unit	1 unit	2016
8	Lap top	1 unit	2016
9	Laptop	1 unit	2016
10	Printer	1 unit	2016
11	Printer	1 unit	2016
12	Gerobak Dorong	1 unit	2017
13	Scanner	1 unit	2017
14	Lemari Besi	1 unit	2017
15	Lemari Kayu	1 unit	2017
16	Lemari Makan	1 unit	2017
17	papan Pengumuman	1 unit	2017
18	Meja 1/2 biro	3 unit	2017
19	Mesin Pemotong Rumput	1 unit	2017
20	A.C. Window	6 unit	2017
21	Kompor Gas	1 unit	2017
22	Dispenser	3 unit	2017
23	Kursi Pejabat Eselon II	1 buah	2017
24	Kursi Pejabat Eselon III	3 buah	2017
25	Proyektor	1 buah	2017
26	Faximili	1 unit	2017
27	PC	1 unit	2017
28	P.C Unit	2 unit	2017
29	Lap Top	1 unit	2017
30	Lap Top	1 unit	2017
31	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2017
32	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2017
33	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2017
34	External/ Portable Hardisk	1 unit	2017
35	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2017
36	Sepeda Motor	2 unit	2017
37	GPS	1 unit	2018
38	Lemari kayu	1 unit	2018
39	Filing Kabinet	1 unit	2018

40	Kipas Angin televesi	1 unit	2018
41	Soun System	1 unit	2018
42	Camera Video	1 unit	2018
43	Camera Video	1 unit	2018
44	Alat Pemadam/Portable Alat	1 unit	2018
45	Meja Kerja Pejabat Eselon	8 unit	2018
46	Meja Kerja Pegawai Non	12 unit	2018
47	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	2018
48	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	2018
49	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	1 unit	2018
50	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	3 unit	2018
51	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	13 unit	2018
52	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	1 unit	2018
53	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	13 unit	2018
54	Kursi Kerja Pegawai Non Struktura	1 unit	2018
55	Camera Elektronik	1 unit	2018
56	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	2 unit	2018
57	alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1 unit	2018
58	Antene VHF/FM Portable	1 unit	2018
59	peralatan antena vhf/fm lainnya (dst)	1 unit	2018
60	Teropong (Senjata Lain - Lain)	1 unit	2018
61	P.C Unit Lap Top Lap Top	1 unit	2018
62	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2018
63	External/ Portable Hardisk	1 unit	2018
64	External/ Portable Hardisk	1 unit	2018
65	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2018
66	Alat Komunikasi SSB	1 Paket	2018
67	Server	1 unit	2018
68	Router	1 unit	2018
69	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2018
70	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2018
71	Peralatan jaringan Lainnya	1 unit	2018

72	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 unit	2018
73	Sepeda Motor	1 unit	2018
74	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	1 unit	2018
75	Kontainer	1 unit	2018
76	Kontainer	1 unit	2018
77	Kontainer	1 unit	2018
78	Alat Penghancur Kertas	1 unit	2018
79	Mesin Absensi	1 unit	2018
80	Mesin Absensi	1 unit	2018
81	Papan Pengumuman	1 unit	2018
82	Kursi Besi	1 unit	2018
83	Meja rapat	1 unit	2018
84	Meja 1/2 biro	1 unit	2018
85	Kursi Rapat	1 unit	2019
86	Kursi Putar	1 unit	2019
87	Lemari Es	1 unit	2019
88	Ac SPLIT	1 unit	2019
89	Ac SPLIT	1 unit	2019
90	Ac SPLIT Split Televisi	1 unit	2019
91	Dispenser	1 unit	2019
92	Gorden	1 unit	2019
93	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	2019
94	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	2019
95	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1 unit	2019
96	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1 unit	2019
97	Unit Tranceiver Ssb Transportable	1 unit	2019
98	Unit Tranceiver HF Portable	1 unit	2019
99	Mainframe (Komputer Jaringan)	1 unit	2019
100	Lap Top	1 unit	2019
101	Lap Top	1 unit	2019
102	Monitor	1 unit	2019

103	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2019
104	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2019
105	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2019
106	Server	1 unit	2019
107	Router	1 unit	2019
108	Router	1 unit	2019
109	tenda	1 unit	2019
110	Scooter	1 unit	2020
111	Scooter	1 unit	2020
112	Microphone	1 unit	2020
113	Microphone/Wireless MIC	1 unit	2020
114	Microphone/Wireless MIC	1 unit	2020
115	Digital Audio Taperecorder	1 unit	2020
116	peralatan studio audio lainnya (dst)	1 unit	2020
117	Camera Electronic	1 unit	2020
118	Camera Electronic	1 unit	2020
119	Camera Electronic	1 unit	2020
120	Tripod Camera Tripod Camera Lensa Kamera Lensa Kamera Handy Talky (HT)	1 unit	2020
121	Portable Noise Monitoring	1 unit	2020
122	Printer (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2020
123	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2020
124	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1 unit	2020
125	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2020
126	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2020
127	Peralatan Personal Komputer lainnya	1 unit	2020
128	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2020
129	Alat Studio Lainnya	1 unit	2021
130	Lap Top	1 unit	2021

131	Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2021
132	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2021
133	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2021
134	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1 unit	2022
135	Lemari Kayu	6 buah	2022
136	Lemari Kaca	1 Buah	2022
137	Medsin Penghisap Debu	1 Buah	2022
138	Mesin Pemotong Rumput	1 Buah	2022
139	Tiang Bendera	20 batang	2022
140	Tangga Aluminium	1 unit	2022
141	Alat Rumah Tangga	1 unit	2022
142	Video Monitor/video tron	1 unit	2022
143	PC Unit	1 unit	2022
144	PC Unit	1 unit	2022
145	Laptop	1 unit	2022
146	Laptop	1 unit	2022
147	Printer (Peralatan Personal) printer	1 unit	2022
148	Printer (Peralatan Personal) printer	1 unit	2022
149	Scaner	1 unit	2022
150	Server	1 unit	2022
151	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2022
152	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2022
153	Peralatan Komputer lainnya	1 unit	2022
154	Peralatan Komputer lainnya	1 unit	2022
155	Lemari Kayu	1 unit	2022
156	Dispenser Dispenser P.C Unit	1 unit	2022
157	P.C Unit	1 unit	2022
158	Lap Top	1 unit	2022
159	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2022
160	Peralatan Jaringan lainnya	1 unit	2023
161	Electric generating set lainnya (dst)	1 unit	2023
162	Sepeda Motor	1 unit	2023
163	Meja Rapat	1 unit	2023
164	Meja Resepsionis	1 unit	2023

165	Kursi Tamu Kursi Putar A.C. Split A.C. Spli	1 unit	2023
166	Vertikal Blind	1 unit	2024
167	KURSI Kera Eselon III	1 unit	2024
168	Video Monitor	1 unit	2024
169	Video Monitor	1 unit	2024
170	Video Switcer	1 unit	2024
171	Alat Studio Lainnya	1 unit	2024
172	Alat komunikasi radio ssb lainnya (dst)	1 unit	2024
173	PC Unit	1 unit	2024
174	PC Unit	1 unit	2024
175	Laptop	1 unit	2024
176	Hard disk	1 unit	2024
177	Speaker Komputer	1 unit	2024
178	Printer (Peralatan Personal Komputer) Rak Server	1 unit	2024
179	Peralatan jaringan Lainnya	1 unit	2024
180	Peralatan jaringan Lainnya	1 unit	2024
181	Kursi Besi/Metal	30 Buah	2024

c. Anggaran

Guna menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara, maka pada tahun 2024 Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 12.954.277.852,00 (Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Dua Rupiah)

Tabel 1.7
Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
Kabupaten Sukamara Tahun 2024

NO	URAIAN	SEBELUM	SESUDAH	BERTAMBAH / BERKURANG	
				(Rp)	%
1	BELANJA OPERASI	7.416.310.006,00	8.500.086.241,00	1.083.776.235,00	12,75
2	Belanja Pegawai	2.899.948.728,00	3.086.437.566,00	186.488.838,00	6,06
3	Belanja Barang dan Jasa	4.516.351.278,00	5.413.648.675,00	897.287.397,00	16,57
4	BELANJA MODAL	3.992.694.071,00	4.454.191.611,00	461.497.540,00	10,36
5	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.924.189.071,00	2.566.826.611,00	642.637.540,00	25,04
6	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.868.930.000,00	1.687.790.000,00	(181.140.000,00)	(10,73)
7	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.575.000,00	199.575.000,00	0,00	0,00

1.4 Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 disajikan berpedoman pada Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Lampiran II. Sejalan dengan hal tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Tugas, Fungsi dan Wewenang
- 1.2 Aspek Strategis
- 1.3 Kegiatan dan Produk Organisasi
- 1.4 Struktur Organisasi dan Lingkungan Strategis Organisasi
- 1.5 Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis
- 2.2 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Lampiran

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan pada masa depan tepat melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategi lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan menyusun suatu perencanaan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya secara berkesinambungan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan dalam hal ini periode Tahun 2024 - 2026 sesuai dengan periode RPJMD Kepala Daerah. Proses inilah yang akan menghasilkan Rencana Strategis (Renstra) instansi pemerintah yang setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator sasaran, kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sukamara tahun 2024 - 2026, visi Kabupaten Sukamara : ***“Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi”***

Untuk mewujudkan visi tersebut, diuraikan dalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan ya

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan	Kondisi Awal			Target Pembangunan			Kondisi Akhir
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Isu Strategis : Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi										
1	Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik	Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Peningkatan Indeks SPBE	1,54	1,84	2	2,5	3	3,5	3,5
			Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Tersedianya buku statistik daerah	Tersedia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Terse dia	Tersedia

2.1.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan implementasi/penjabaran dari misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai dan menghasilkan apa, dalam kurun waktu tertentu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Adapun rumusan tujuan di dalam Perencanaan Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sukamara dalam mensinergikan misi RPJMD Kabupaten Sukamara yang ke 5 (Lima) yaitu Tata kelola Pemerintahan Yang Baik dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian kab Sukamara berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2024 - 2026. Sasaran tersebut adalah:

1. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)
2. Optimalisasi Pemanfatan sarana dan prasarana Komunikasi informatika Persandian dan statistik

2.1.2 Strategi dan Kebijakan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan bagaimana hal tersebut akan dicapai. Adapun cara mencapai tujuan dan sasaran meliputi penetapan kebijakan, program dan

kegiatan.

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman dan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi. sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Agar tujuan dan sasaran dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, maka dilaksanakan kegiatan pada tahun anggaran berkenaan melalui arah kebijakan dan program sebagai berikut:

A. Sasaran Strategis Pertama

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik

Sasaran :

Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Indikator Sasaran :

Peningkatan Nilai Indeks SPBE

Strategi :

Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)

Kebijakan :

- Melaksanakan Sosialisasi tentang SPBE
- Melaksanakan Perencanaan dan Peta Rencana SPBE dalam peraturan daerah
- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan SPBE di Kabupaten Sukamara
- Koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat terhadap pelaksanaan SPBE di wilayah Kabupaten Sukamara

Program

- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- Kegiatan Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- SUB KEGIATAN :
 - Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah
 - Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)

B. Sasaran Strategis Ke Dua

Tujuan :

Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintah dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik

Sasaran :

Terwujudnya Kinerja tata kelola Pemerintahan yang Akuntabel

Indikator Sasaran :

Peningkatan Nilai Indeks SPBE

Strategi :

Optimalisasi Pemanfaatan sarana dan prasarana Komunikasi informatika Persandian dan Statistik

Kebijakan :

- Malaksanakan sosialisasi tentang Internet Sehat
- Malaksanakan Bimbingan terhadap sumber daya manusia komunikasi, persandian dan statistik
- Mengelola web site Kabupaten sebagai salah satu media komunikasi
- Meningkatkan kualitas Desiminasi Informasi melalui Mitra pemerintah dan media online
- Meningkatkan kualitas data statistik
 - sektoral

Program

A. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan Layanan Hubungan Media

B. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

Sub kegiatan

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral
- Membangun Metadata Statistik Sektoral

C. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

- Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

2.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen ini berisi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan, indikator kinerja, dan target kinerja yang diperjanjikan dalam satu tahun serta memuat rencana anggaran untuk program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis. Target dari indikator kinerja sasaran program dan sasaran kegiatan ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik indikator yang digunakan.

Satuan kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk

menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program. Program yang disertai dengan indikator hasil program dan indikator hasil kegiatan dituangkan dalam satu dokumen Perjanjian Kinerja (PK).

Kegiatan dan anggaran pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan tabel 2.2.

Tabel 2.2
Realisasi anggaran tahun 2024

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	12.954.277.852	12.199.489.117	94,17
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.746.175.252	12.039.772.575	94,46
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	12.746.175.252	12.039.772.575	94,46
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.075.226.376	8.450.471.843	93,12
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.897.587.566	2.905.955.261	96,94
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.257.566	2.790.785.261	97,20
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.840.000	49.740.000	86,00
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.490.000	65.430.000	95,53
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	287.067.500	212.529.930	74,03
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.067.500	32.593.514	87,93
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	179.936.416	71,97
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.109.896	779.356.626	94,57
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	102.585.374	97.648.000	95,19
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.713.000	24.878.500	83,73
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.045.422	65.370.400	87,11
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.500.000	26.582.545	84,39
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000	3.570.000	30,06
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Fasilitas Kunjungan Tamu	29.886.200	19.595.800	65,57
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.500.000	541.711.381	99,67
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.372.692.287	4.088.358.863	93,50
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.200.000	26.650.000	94,50
2.16	2.16.0.00.2.2013.0000 Pengadaan Mebel	71.958.000	67.096.905	93,24

Kode		Kategori		Anggaran		Realisasi	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		2.047.528.287	1.902.571.487	92,92	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		2.225.006.000	2.092.040.491	94,02	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		377.509.027	306.195.963	81,11	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		375.000		0,00	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		159.779.147	107.440.603	67,24	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		217.354.880	198.755.380	91,44	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		216.260.000	158.075.200	73,09	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		180.180.000	115.175.200	71,91	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		56.100.000	42.900.000	76,47	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		1.429.395.000	1.389.947.594	97,24	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		1.429.395.000	1.389.947.594	97,24	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Layanan Hubungan Media		1.429.395.000	1.389.947.594	97,24	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		2.241.553.876	2.199.353.138	98,12	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		2.241.553.876	2.199.353.138	98,12	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		241.015.500	238.368.000	98,90	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah		1.910.329.605	1.872.282.090	98,01	
2.16	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)		90.208.771	88.703.048	98,33	
2.20		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		170.105.100	144.280.447	84,82	
2.20	2.16.0.00.2.20.13.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		170.105.100	144.280.447	84,82	
2.20	2.16.0.00.2.20.13.0000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		170.105.100	144.280.447	84,82	
2.20	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		170.105.100	144.280.447	84,82	
2.20	2.16.0.00.2.20.13.0000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		123.880.100	110.965.447	89,57	
2.20	2.16.0.00.2.20.13.0000	Membangun Metadata Statistik Sektoral		46.225.000	33.325.000	72,09	
2.21		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		37.997.500	15.436.095	40,62	
2.21	2.16.0.00.2.20.13.0000	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN		37.997.500	15.436.095	40,62	
2.21	2.16.0.00.2.20.13.0000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		37.997.500	15.436.095	40,62	
2.21	2.16.0.00.2.20.13.0000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		37.997.500	15.436.095	40,62	
2.21	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		20.815.000	7.000.000	33,63	
2.21	2.16.0.00.2.20.13.0000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		17.182.500	8.436.095	49,10	
		Jumlah		12.954.277.852	12.199.489.117	94,17	

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja
Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Sukamara
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	Layanan Hubungan Media	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	241.015.500	238.368.000	98,90
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.910.329.605	1.872.282.090	98,01
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	90.208.771	88.703.048	98,33
Tersedianya buku statistik daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	170.105.100	144.280.447	84,82
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	170.105.100	144.280.447	84,82
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	170.105.100	144.280.447	84,82
Tersedianya buku statistik daerah	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	170.105.100	144.280.447	84,82
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	123.880.100	110.955.447	89,57
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	46.225.000	33.325.000	72,09
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	37.997.500	15.436.095	40,62
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	37.997.500	15.436.095	40,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37.997.500	15.436.095	40,62
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.997.500	15.436.095	40,62
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.815.000	7.000.000	33,63
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	17.182.500	8.436.095	49,10

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024 yang ditujukan untuk memenuhi target rencana kinerja yang telah ditetapkan. Dalam uraian berikut disajikan pula akuntabilitas Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara dari aspek keuangan, sumber daya manusia, dan sarana prasarana sebagai unsur penunjang pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran dalam rangka mewujudkan misi yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan satuan target kinerja yang telah ditetapkan dari masing-masing indikator kinerja sasaran dengan realisasi target kinerja yang diperoleh atau dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen pelaksanaan anggaran.

Pengukuran kinerja, memuat tentang sasaran strategis, indikator kinerja sasaran (outcome), target kinerja (output), realisasi, persentase capaian target kinerja, program dan kegiatan, dan persentase realisasi anggaran per program dan kegiatan. Inti dari pengukuran kinerja adalah membandingkan antara capaian kinerja yang diukur dengan indikator kinerja atau ukuran kinerja sebagai alat ukurnya serta dengan menggunakan metode pengukuran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan suatu sasaran strategis dapat diukur melalui capaian indikator kinerja. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja.

3.1 Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara melaksanakan Pengukuran Kinerja yang mengacu pada penilaian indikator kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya. Persentase capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (RENJA).

Capaian kinerja yang ingin diketahui melalui pengukuran kinerja ini adalah adanya kesinambungan atau sinergi antara visi-misi-tujuan dan sasaran strategis dengan menggunakan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara tahun 2024.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara berupaya untuk mewujudkan sasaran yang dirumuskan untuk dicapai dalam kurun waktu 2024- 2026, salah satu Sasaran tersebut adalah Meningkatkan Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien dan Transparansi Informasi Publik.

Membandingkan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini Untuk melihat keberhasilan capaian kinerja pada Perangkat Daerah dapat dilihat dari capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas. Adapun capaian IKU Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara.

Tabel 3.1
Capaian Target dan Realisasi
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Target (2024)	Realisasi (2024)	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Indeks SPBE	Indeks SPBE	Nilai	2,5	2,75	110%
2.	Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	100 %	Persentase	100%	100%	100%
3.	Tersedianya buku statistik daerah	Tersedia	Ada	Ada	Ada	Ada

A. Peningkatan Indeks SPBE

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yakni Meningkatkan Penerapan e- Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang aman, efektif dan efisien sedangkan untuk IKU berupa Indeks SPBE ditargetkan Tahun 2024 dengan nilai 2,5 dengan realisasi sebesar 2,75 atau 110% dari target.

Tabel 3.2
Realisasi Program Anggaran, Capaian Kinerja
Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
1	2	3	4	5
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
	Layanan Hubungan Media	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	241.015.500	238.368.000	98,90
	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.910.329.605	1.872.282.090	98,01
	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	90.208.771	88.703.048	98,33

Dilihat pada tabel diatas dapat dilihat untuk realisasi :

A. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media sebesar 97,12%.

Berdasarkan tabel di atas maka sub kegiatan Layanan Hubungan Media dengan pagu anggaran 1.429.395,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 97,24 Persen dan realisasi fisik sebesar 100 % berupa kerjasama dengan mas media untuk menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun data mas media yang bekerja sama dengan Pemerintah daerah Sukamara dalam menyelenggarakan penyebaran informai antara lain :

Tabel 3.3
Tabel Kerjasama dengan mas media
Tahun 2024

NO	NAMA PT/CV	TENTANG	JENIS MEDIA	NAMA MEDIA ELEKTRONIK/WEBSITE
1	TVRI KALIMANTAN TENGAH	KERJASAMA DENGAN MEDIA TELEVISI NASIONAL TAHUN 2024	media elektronik	TVRI Kalimantan Tengah
2	PT. SHINTA BUANA VISION	KERJASAMA DENGAN MEDIA TELEVISI LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	SBTV Sukamara
3	PT. SUKAMARA JAYA VISION	KERJASAMA DENGAN MEDIA TELEVISI LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	SJTV
4	PT. SUARA KALTENG PRESS	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Mingguan SUARA KALTENG
5	PT. MEDIA PALANGKA PAMBELUM	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian PALANGKA POST
6	PT. PUTRA SAMPIT PERDANA	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian RADAR SAMPIT
7	PT. PALANGKA EKSPRES	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian PALANGKA EKSPRES
8	PT. KALTENG POS PRESS	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian KALTENG POS
9	PT. MEDIA BERSAMA	KERJASAMA DENGAN MEDIA CETAK LOKAL TAHUN 2024	media cetak	Surat Kabar Harian TABENGAN
10	LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE NASIONAL TAHUN 2024	media elektronik	kalteng.antaranews.com
11	PT. SAMPIT DIGITAL MEDIA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	beritasampit.co.id
12	PT. MEDIA KALIMANTAN MANDIRI	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	borneoneews.co.id
13	PT. RAJA DIGITAL MEDIA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	matakalteng.com
14	PT. MEDIA KALTENG SEJAHTERA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	radar-kalteng.com
15	PT. HALO DAYAK NUSANTARA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	HALODAYAK.com
16	PT. INTIM MEDIA PERKASA	KERJASAMA DENGAN MEDIA ONLINE LOKAL TAHUN 2024	media elektronik	www.intimnews.com

Kendala :

- Kurangnya anggaran

Solusi

- Mengajukan permohonan penambahan anggaran

B. Sub Kegiatan Penata Laksanaan dan pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupten/Kota sebesar 98,9%
Berdasarkan tabel di atas Sub Kegiatan Penata Laksanaan dan pengawasan E-Government Dalam Penyelenggaraan Pemerintah daerah Kabupten/Kota pagu anggaran Rp 241.368.000,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 98,9% atau Rp 238.368.000,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

Gambar 3.1
Kegiatan Forum FGD
SOP SPBE dan PEDOMAN MANAJEMEN RESIKO



Gambar 3.2
Cover Dokumen SOP SPBE



C. Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah

Berdasarkan tabel di atas Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat data Pemerintah daerah dengan pagu anggaran Rp 1.910.329.605,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 98,01% atau Rp 1.872.282.090,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

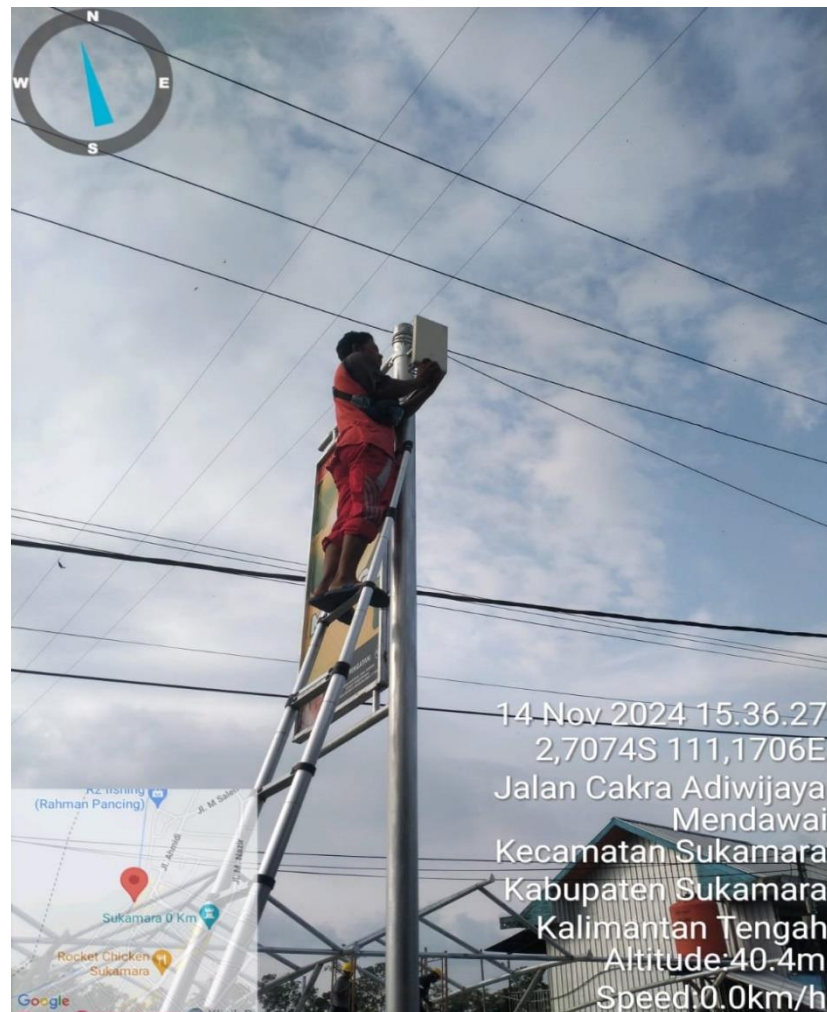
Dengan output pekerjaan antara lain :

1. Maintenance jaringan fiber optik

Terpeliharanya jaringan fiber optik Kabupaten Sukamara tahun 2024

Gambar 3.3
Maintenance Jaringan Fiber Optik





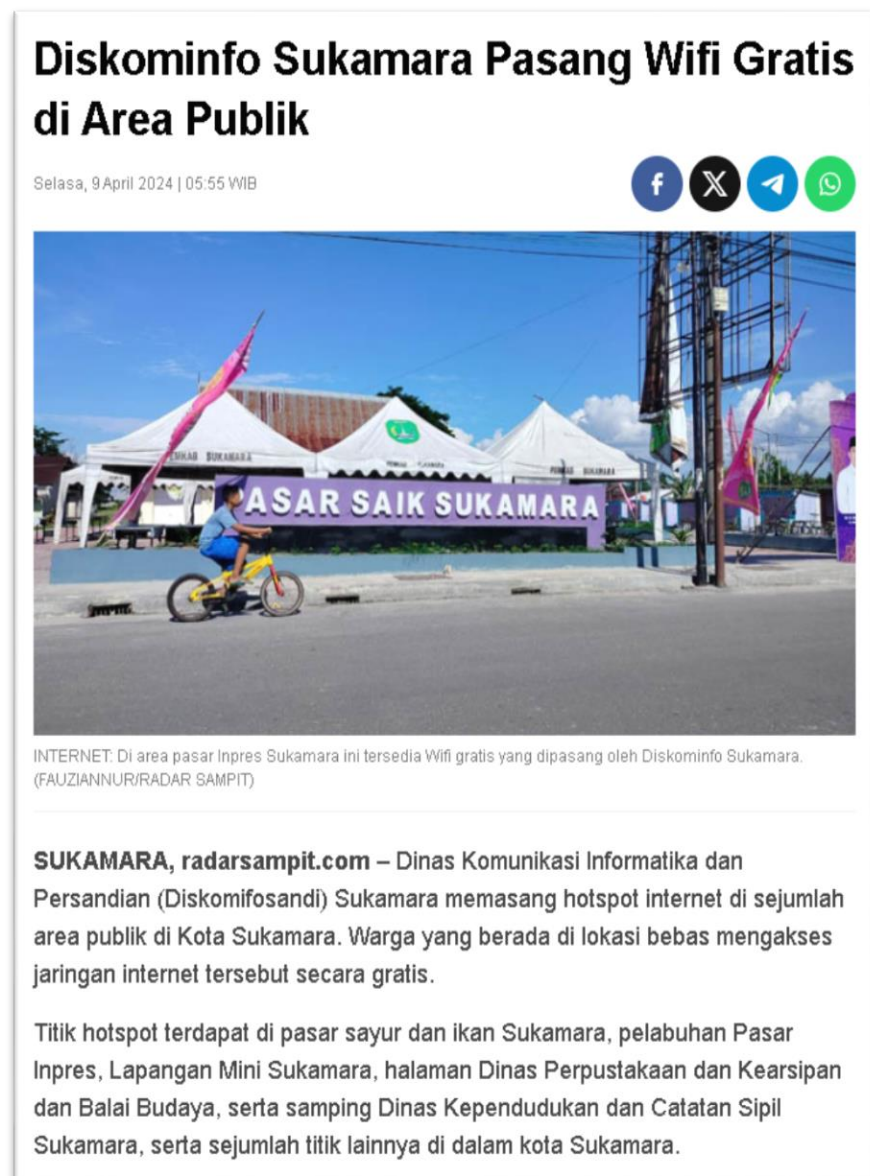
2. Terdistribusinya intranet dan internet satu pintu melalui Dinas Kominfoandi.

Pada kondisi ini Dinas Komunikasi Informatika dan persandian mampu melayani jaringan internet 26 SOPD dari total SOPD atau pencapaian 86,86 % dari SOPD yang ada. Sedangkan yang bisa dilayani sebanyak 4 SOPD karena jarak yang jauh dari Pusat Kabupaten.

3. Tersedianya Internet Umum /Wifi Publik

Pada kondisi ini Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian memelihara dan memfasilitasi keberadaan WIFI Publik di tempat umum Kabupaten Sukamara.

Gambar 3.4
Pemasangan Wifi Publik



4. Pemeliharaan Server Kabupaten Sukamara

Pada Pekerjaan ini maka Diskominfo menjaga kelangsungan dan keberlanjutan SERVER Kabupaten yang telah di gunakan sebagian SOPD.

D. Sub Kegiatan Pengelolaan E Government Chief Information Officer (GCIO)

Berdasarkan tabel di atas Sub Kegiatan Pengelolaan E Government Chief Information Officer (GCIO) dengan pagu anggaran Rp 90.208.771,00 mempunyai realisasi keuangan sebesar 98,33% atau Rp 88.703.048,00 dan realisasi fisik sebesar 100%.

Pada sub kegiatan ini berisi pengadaan komputer dan perlengkapannya untuk menunjang urusan PPID (Pejabat Pengelola Informasi daerah)

2. *Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi*

Tabel 3.4
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	37.997.500	15.436.095	40,62
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37.997.500	15.436.095	40,62
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.997.500	15.436.095	40,62
	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	20.815.000	7.000.000	33,63
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	17.182.500	8.436.095	49,10

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yakni Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi dengan realisasi keuangan sebesar 40,62% atau Rp 15.436.095,00 dari Pagu Rp 37.997.500,00. Dengan Realisasi Fisik sebesar 100 %.

Sub Kegiatan Pendukung Persentase Perangkat Daerah yang telah mengamankan informasi

A. Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota.

Sub kegiatan ini dengan pagu Rp 20.815.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 7.000.000,00 atau realisasi keuangan sebesar 33,63 %.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Perbaikan radio SSB

Gambar 3.5
Maintenance Jaringan SSB



2. Sosialisasi Keamanan Informasi

Pekerjaan ini tidak dilaksanakan karena :

- Tidak terdapat SDM yang mempunyai keahlian Persandian yang bersertifikasi

Solusi

- Dievaluasi untuk tahun anggaran berikutnya
- Melaksanakan BIMTEK untuk SDM urusan Persandian

B. Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Sub kegiatan ini dengan pagu Rp 17.182.500,00 dengan realisasi sebesar Rp 8.436.095,00 atau realisasi keuangan sebesar 49,10 %.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Bimbingan Teknis Persandian
2. Evaluasi TTE

Tidak di laksanakan karena :

- Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Persandian

Solusi :

- Mengajukan penambahan SDM ke Badan Kepegawaian Daerah Kab Sukamara

3. Tersedianya buku statistik daerah

Tabel 3.5
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Tersedianya Buku Statistik Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU)	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
Tersedianya buku statistik daerah	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	170.105.100	144.280.447	84,82
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	170.105.100	144.280.447	84,82
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	170.105.100	144.280.447	84,82
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	123.880.100	110.955.447	89,57
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	46.225.000	33.325.000	72,09

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa Sasaran Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Sukamara yakni Tersedianya Buku Statistik Daerah dengan realisasi keuangan sebesar 84,82 % atau Rp 144.280.447,00 dari Pagu Rp 170.105.100,00. Dengan Realisasi Fisik sebesar 100 %.

Sub Kegiatan Pendukung Tersedianya buku statistik daerah adalah :

A. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral.

Sub Kegiatan ini dengan Pagu sebesar Rp 123.880.700 dengan realisasi keuangan sebesar 89,57 % atau Rp 110.955.447,00.

Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Cetak Buku Sukamara dalam angka.
2. Cetak Buku Inkesra.
3. Cetak Buku PDRB.

Gambar 3.6
Pendistribusian Buka Buka Statistik



B. Sub Kegiatan Koordinasi Membangun Meta Data Ststistik Sektoral

Sub Kegiatan ini dengan Pagu sebesar Rp 46.225.000,00 dengan realisasi keuangan sebesar 72,09 % atau Rp 33.325.000,00 dan realisasi Fisik 100 %.

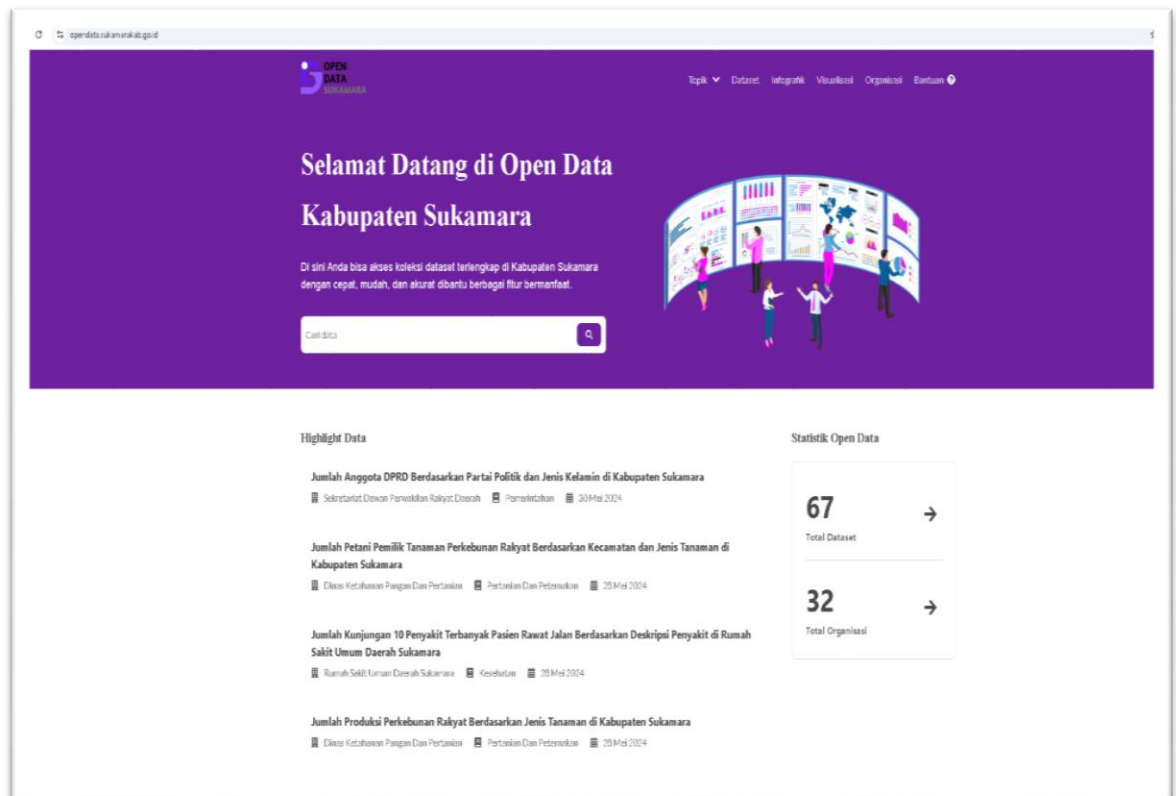
Dengan Output Pekerjaan antara lain :

1. Membangun Satu Data Sukamara

Pemerintah Kabupaten Sukamara melalui Dinas Komunikasi Informatika dan

Persandian Sukamara memiliki kebutuhan untuk membangun Satu Data Sukamara yang dimiliki oleh seluruh OPD dan Desa/Kelurahan sehingga Masyarakat mendapatkan kemudahan akses pemanfaatan terhadap data public dari tingkatan paling bawah

Gambar 3.7
Portal Satu Data Sukamara



Gambar 3.8
Pelatihan Operasional Satu Data



3.2 Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2024

Tabel 3.6
Realisasi Tahun Anggaran 2024

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN/INDIKATOR	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	9.075.226.376	8.450.471.843	93,12
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.997.587.566	2.905.955.261	96,94
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.871.257.566	2.790.785.261	97,20
			<i>Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik</i>	12 bulan	12 bulan	
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	57.840.000	49.740.000	86,00
			<i>Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN</i>	8 dokumen	8 dokumen	

			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	68.490.000	65.430.000	95,53
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	<i>8 laporan</i>	<i>8 laporan</i>	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	287.067.500	212.529.930	74,03
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	37.067.500	32.593.514	87,93
			<i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>	<i>27 Stel</i>	<i>27 Stel</i>	
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	250.000.000	179.936.416	71,97
			<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>30 Orang</i>	<i>30 Orang</i>	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	824.109.996	779.356.626	94,57
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	102.585.374	97.648.000	95,19
			<i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>2 paket</i>	
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	29.713.000	24.878.500	83,73
			<i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>	<i>1 paket</i>	<i>1 paket</i>	
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	75.045.422	65.370.400	87,11

			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>	<i>2 paket</i>	<i>2 paket</i>	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	31.500.000	26.582.545	84,39
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	<i>3 paket</i>	<i>3 paket</i>	
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.880.000	3.570.000	30,05
			<i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>2 dokumen</i>	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	29.886.200	19.595.800	65,57
			<i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>	<i>4 laporan</i>	<i>4 laporan</i>	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	543.500.000	541.711.381	99,67
			<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>15 Laporan</i>	<i>15 Laporan</i>	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.372.692.287	4.088.358.863	93,50
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	28.200.000	26.650.000	94,50
			<i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	
			Pengadaan Mebel	71.958.000	67.096.905	93,24
			<i>Jumlah Paket Mebel yang disediakan</i>	<i>3 unit</i>	<i>3 unit</i>	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.047.528.287	1.902.571.467	92,92

			<i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>	<i>4 unit</i>	<i>4 unit</i>	
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2.225.006.000	2.092.040.491	94,02
			<i>Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>	<i>1 unit</i>	<i>1 unit</i>	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	377.509.027	306.195.963	81,11
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	375.000	-	-
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>8 Laporan</i>	<i>-</i>	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	159.779.147	107.440.603	67,24
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>	<i>24 laporan</i>	<i>24 laporan</i>	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	217.354.880	198.755.360	91,44
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>	<i>8 laporan</i>	<i>8 laporan</i>	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	216.260.000	158.075.200	73,09
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	160.160.000	115.175.200	71,91
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>	<i>14 unit</i>	<i>14 unit</i>	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.100.000	42.900.000	76,47

			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	24 unit	24 unit	
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
			Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
			Layanan Hubungan Media	1.429.395.000	1.389.947.594	97,24
			<i>Terkelola dengan baik informasi pembangunan daerah melalui desiminasi infomasi dengan menggunakan sarana media massa</i>	1 dokumen	1 dokumen	
			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
			Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.241.553.876	2.199.353.138	98,12
			Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	241.015.500	238.368.000	98,90
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</i>	2 dokumen	2 dokumen	
			Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	1.910.329.605	1.872.282.090	98,01
			<i>Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintah daerah dengan baik berbasis SPBE</i>	12 bulan	12 bulan	
			Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	90.208.771	88.703.048	98,33

			<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)</i>	<i>4 dokumen</i>	<i>4 dokumen</i>	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	170.105.100	144.280.447	84,82
			Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	170.105.100	144.280.447	84,82
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	123.880.100	110.955.447	89,57
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral</i>	<i>1 dokumen</i>	<i>1 dokumen</i>	
			Membangun Metadata Statistik Sektoral	46.225.000	33.325.000	72,09
			<i>Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun</i>	<i>3 dokumen</i>	<i>3 dokumen</i>	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	37.997.500	15.436.095	40,62
			Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	37.997.500	15.436.095	40,62
			Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan	20.815.000	7.000.000	33,63

Lakip DiskominfoSansi 2024

			Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
			<i>Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>2 laporan</i>	<i>2 laporan</i>	
			Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	17.182.500	8.436.095	49,10
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>1 laporan</i>	<i>1 laporan</i>	
				12.954.277.852,00	12.199.489.117,02	94,17 %

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan selama kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2024

Laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sukamara.

Pada tahun 2024 capaian kinerja program menunjukkan realisasi keuangan sebesar Rp 12.199.489.117,00 dari pagu anggaran Rp 12.954.277.852,00 atau 94,2 %.

Hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis pada bab terdahulu, maka secara umum Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara, telah dapat merealisasi pencapaian target sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja tahun 2024 yang terdapat pada uraian akuntabilitas.

4.2 Saran

1. Pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab Sukamara tahun 2024 mempunyai beberapa kendala. Untuk pelaksanaan pengadaan barang, perubahan harga barang serta tidak tersedianya barang yang dibutuhkan menjadi salah satu faktor penghambat realisasi kegiatan maupun anggaran.
2. Pelaksanaan penyebaran informasi kepada masyarakat yang seharusnya dilaksanakan secara langsung, berubah pelaksanaannya. Penyebaran informasi dilaksanakan melalui media-media online berupa media social, website dan lainnya, tidak menggunakan media konvensional lainnya. Minimnya anggaran juga menyebabkan kurang optimalnya penyebaran informasi kepada masyarakat.

3. Untuk tetap dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya perbaikan, diantaranya:
 - a. Perlu dilakukan peningkatan kapabilitas ASN dengan bimbingan teknis dan pelatihan teknis maupun umum
 - b. Pembangunan jaringan intra pemerintah daerah merupakan salah satu komponen penting penilaian SPBE, sehingga perlu mendapat alokasi anggaran yang cukup besar untuk dapat menyediakan jaringan intra pemerintah daerah.
 - c. Mengoptimalkan peran masyarakat yang sudah terbentuk melalui fasilitasi kegiatan yang tertuang dalam program kebijakan pemerintah.
 - d. Evaluasi intensif dalam pelaksanaan program / kegiatan / sub kegiatan sehingga dapat mengantisipasi hambatan